



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI JIWANTARA
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 12792

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/130 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/400 m2 di KOTA SEMARANG
, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/90 m2 di BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 541.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1995, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MOBIL Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 123.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 150.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.564.900.000**



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.564.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.